



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONI ERRY SAPUTRO
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 101367

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/245 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000
2. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000
4. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 2.225 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , Rp. 710.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/86 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, Rp. 915.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/68 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, Rp. 815.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **289.000.000**



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1973, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA MINIBUS Tahun 1992, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, WARISAN Rp.
260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	861.371.665
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.719.371.665

III. HUTANG	Rp.	----
-------------	-----	------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.719.371.665
-----------------------------------	-----	---------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RETNO NAWANGSIH
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NIK : 81207

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.330.000.000**

1. Tanah Seluas 705 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/60 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 2.846 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/220 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 289.300.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000



5. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 80.000.000		
6. MOTOR, HONDA ADVENTURE TOURING 2 SEATER Tahun 2023,		
HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
7. MOTOR, YAMAHA TURBO TECH MAX ULTIMATE Tahun 2024,		
HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	225.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	72.117.458
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	5.916.417.458
III. HUTANG	Rp.	1.624.208.334
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.292.209.124

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dan elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASWIRMAN, S.H., M.H.
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 422541

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 553.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.531.105

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.258.431.105

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.258.431.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIK RAHMAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **452129**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 880.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 880.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. LAINNYA, GIANT SEPEDA GUNUNG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA GUNUNG Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000
3. MOTOR, HONDA BEAT POP SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.631.685

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 897.699.685

III. HUTANG Rp. 880.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 17.699.685

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVY DEWI CAHYATI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 98770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.623.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 921.000.000
2. Tanah Seluas 2.502 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 341.000.000
3. Tanah Seluas 1.120 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 361.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 442.135.000

1. MOTOR, YAMAHA BGH-AI A/T/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CPT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX BWP AT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 40.135.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 72.050.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.212.185.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.212.185.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISTYORANI IMAWATI

2. Jabatan : HAKIM

3. NHK : 97083

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	80.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	90.000.000

III. HUTANG	Rp.	----
-------------	-----	------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	90.000.000
-----------------------------------	-----	------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKI YUSTIKA PUTRI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 97056

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Bangunan Seluas 73 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 512.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU ALL NEW XENIA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.957.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 583.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.698.957.000

III. HUTANG Rp. 394.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.304.957.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 108296

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.129.410.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/45 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 160.080.000
2. Tanah Seluas 4.500 m2 di KAB / KOTA TAKALAR, HASIL SENDIRI Rp. 66.330.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 406.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 407.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 263.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS 1.2 E M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000



3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000

4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1,5 L EXCEED L (4X2) M/T Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	301.625.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	72.786.384
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	2.766.821.384
III. HUTANG	Rp.	1.744.091.527
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.022.729.857

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA PINGKAN TELEW
2. Jabatan : HAKIM
3. NIK : 203774

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	395.000.000
1. MOBIL HYUNDAI MOBIL PENUMPANG/MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	34.080.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	479.080.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	479.080.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari ethkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui ethkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RORY YONALDI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 281260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 53.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
3. MOTOR, KAWAZAKI KR 150K (NINJA RR) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.373.500.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.353.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN KUSPRIYATNO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 885780

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	152.870.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
152.870.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	192.620.000
III. HUTANG	Rp.	82.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	110.620.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : DIAN KUSPRIYATNO
NIK : 3276021008890006
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 18 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMBALI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 624250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	286.470.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/36 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 286.470.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	318.470.000

III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	318.470.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS SUSANTO
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 930977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 765.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/152 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA BEBEK Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 892.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 892.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARI HENDRAWAN
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA
3. NHK : 252375

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.540.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.902.224

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 741.942.224

III. HUTANG Rp. 210.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 531.942.224

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERDYAN SHONATA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 203767

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 165.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 857.000.000

III. HUTANG Rp. 123.023.453

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 733.976.547

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN PERADILAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARIA FRANSISKA WALINTUKAN
2. Jabatan : HAKIM YUSTISIAL
3. NHK : 651505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.000.000
1. MOTOR, --- MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.127.000.000
III. HUTANG	Rp.	801.068.260
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	325.931.740

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALMAN KHALIK ALFARISI**

2. Jabatan : **HAKIM**

3. NHK : **204688**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	87.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	87.000.000

III. HUTANG	Rp.	811.200.000
--------------------	-----	-------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-724.200.000
--	-----	--------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIRDAYATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 656632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.270.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.991.937
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	574.261.937

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **574.261.937**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, SH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 451646

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	45.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI	Rp.	
45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	78.000.000
III. HUTANG	Rp.	136.700.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-58.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASURI
2. Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
3. NHK : 443535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 797.000.000

1. Tanah Seluas 578 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, Rp. 115.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MPV Tahun 2010, WARISAN Rp. 65.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. LAINNYA, TORA SEPEDA LISTRIK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 76.776.096

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	991.476.096
III. HUTANG	Rp.	212.236.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	779.240.096

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAHIBUR RASID, SH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 416910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah Seluas 452 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	324.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, PAJERO SPORT MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	355.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	630.000.000
Sub Total	Rp.	1.709.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.709.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NURLAELIYAH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 930996

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	136.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.		
16.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.		
120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.190.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	170.190.000
III. HUTANG	Rp.	203.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-33.010.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ULIA ALBA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 552355

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 262.500.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 187.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 268.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 173.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 549.100.000

III. HUTANG Rp. 182.520.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 366.580.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD SOLEH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 443823

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.000.000
III. HUTANG	Rp.	185.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-179.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

1271151407870001

2. Nama

JIMMY FERNANDO DAPOT SIANTURI, SH

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

1271151407870001

5. No. Telepon

081375642028

6. Email

jimmyreszka@yahoo.com

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

51.149.204

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)

3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

51.149.204

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

51.149.204

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/1 = 63.000.000

63.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

7

PPh terutang

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

0

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0



NIK/NPWP 1271151407870001

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK 2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11	a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)		0
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? 1. Tidak, saya tidak memilikinya. (lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)		0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya		☐	
12	a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulan	-
	b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)	-

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:	Nomor rekening	Nama bank
1. Dikembalikan melalui pemeriksaan. 2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.	Nama pemilik rekening	

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13	a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak x (9-10a)	1	0
	b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)	1	0
	c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.	1	

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14	a	Harta pada akhir Tahun Pajak (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		383.000.000
	b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)	1	
	h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)		0

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15	a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	1	1. Tidak 2. Ya
	b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	1	1. Tidak 2. Ya
	c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	1	1. Tidak 2. Ya
	d	Surat kuasa khusus	1	1. Tidak 2. Ya
	e	Dokumen lainnya	1	1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran saya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan	1	1. Wajib Pajak 2. Kuasa	Tanggal	13 Februari 2026
NIK/NPWP	1271151407870001		Tanda Tangan	
Nama	JIMMY FERNANDO DAPOT SIANTURI, SH			



to me ▾



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 📞 informasi@pajak.go.id 📧
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-15529/CT/KPP.0801/2026**
Tanggal : 10 Februari 2026

NPWP : 3278085510890004
Nama Wajib Pajak : PERINA NUR ASSYIFA

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 10 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

3520151904930001

2. Nama

RANDY SETIA PUTRA

3. Jenis ID

KTP

4. No. ID

3520151904930001

5. No. Telepon

081225437743

6. Email

RANDYSP212@GMAIL.COM

7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

8. NIK/NPWP Suami/Istri

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1

a

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)

2

52.368.903

b

1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

1

2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dan usaha yang dikenakan pajak bersifat final. (Lanjut ke pertanyaan 1c)

3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)

4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

c

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

d

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2

Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

52.368.903

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

4

Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

52.368.903

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/0 = 58.500.000

58.500.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

7

PPh terutang

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

D. KREDIT PAJAK

10

a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

2

0

b

Angsuran PPh Pasal 25

0

c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

0

d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?

1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

1

0



NIK/NPWP 3520151904930001

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK 2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11	a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)		0
	b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? 1. Tidak, saya tidak memilikinya. (lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)		0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya			
12	a	PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulan	-
	b	PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)	-

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:	Nomor rekening	Nama bank
1. Dikembalikan melalui pemeriksaan. 2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan.	Nama pemilik rekening	

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13	a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak) x (9-10a)	1	0
	b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 4 Bagian A)	1	0
	c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? 1. Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25. 2. Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.	1	

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14	a	Harta pada akhir Tahun Pajak (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		414.000.000
	b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	
	g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)	1	
	h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)		0

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15	a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	1	1. Tidak 2. Ya
	b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	1	1. Tidak 2. Ya
	c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	1	1. Tidak 2. Ya
	d	Surat kuasa khusus	1	1. Tidak 2. Ya
	e	Dokumen lainnya	1	1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiranannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan	1	1. Wajib Pajak 2. Kuasa	Tanggal	12 Februari 2026
NIK/NPWP	3520151904930001		Tanda Tangan	
Nama	RANDY SETIA PUTRA			



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-30416/CT/KPP.0802/2026
Tanggal	: 04 Februari 2026
NPWP	: 3671085011840005
Nama Wajib Pajak	: SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 04 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretaxi DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak

12:38 (13 minutes ago)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan : (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	BPE-10762/CT/KPP.3106/2026
Tanggal	04 Februari 2026
NPWP	5201027110000004
Nama Wajib Pajak	NI NENGAH DHEA RISK PUTRI NANDITA
Jenis SPT	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	2025
Masa Pajak	Januari - Desember 2025
Status SPT	Normal
Saluran	Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	04 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Direktorat DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon sampaikan email ini sebagai bukti penerimaan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 layanan@pajak.go.id

www.pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-13134/CT/KPP.2214/2026
Tanggal : 04 Februari 2026
NPWP : 3172021501940006
Nama Wajib Pajak : IMAD 'AQIL
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 04 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: effendisubia@gmail.com

Sen, 9 Feb 2026 pukul 09.46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-14735/CT/KPP.0812/2026
Tanggal	: 09 Februari 2026
NPWP	: 3602142512980001
Nama Wajib Pajak	: HELVAN SUBIA EFFENDI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2 messages

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
To: fitri.nofita@gmail.com

Thu, Feb 12, 2026 at 11:27 AM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan (021) 1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-73719/CT/KPP.0808/2026
Tanggal	: 12 Februari 2026
NPWP	: 3603284611940001
Nama Wajib Pajak	: FITRI INDRIATI NOFITA
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 12 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
To: fitri.nofita@gmail.com

Thu, Feb 12, 2026 at 11:29 AM

[Quoted text hidden]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ◆ informasi@pajak.go.id ◆

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

BPE	: BPE-30029/CT/KPP.0802/2026
al	: 04 Februari 2026
	: 3671091011950001
Wajib Pajak	: PRAYOGA ANDI DARUSSALAM
SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak	: 2025
Pajak	: Januari - Desember 2025
SPT	: Normal
n	: Portal Wajib Pajak
al Terima SPT	: 04 Februari 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-17528/CT/KPP.2302/2026
Tanggal : 04 Februari 2026
NPWP : 3471016306990002
Nama Wajib Pajak : JUNITA NINGSIH
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 04 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Bukti Penerimaan Elektronik

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak

4 Feb 2026, 12:45 (7 days ago)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-04780/CT/KPP.0910/2026
Tanggal	: 04 Februari 2026
NPWP	: 3214016901000004
Nama Wajib Pajak	: MELIN SIMORANGKIR
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 04 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

: BPE-11473/CT/KPP.0812/2026

: 04 Februari 2026

: 3604190909930005

: AHMAD RULI HIDAYAT

: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

: 2025

: Januari - Desember 2025

: Normal

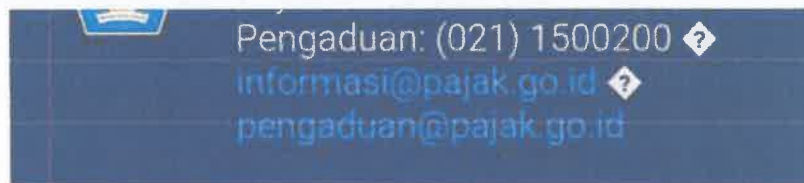
: Portal Wajib Pajak

PT : 04 Februari 2026

Surat ini dibuat secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak perlu tanda tangan basah.

menggunakan layanan digital DJP, SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : BPE-
BPE 12123/CT/KPP.0801/2026
Tanggal : 04 Februari 2026

NPWP : 3328091812810012

Nama : SUSHARDIYANTO
Wajib : WIBOWO
Pajak

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun : 2025
Pajak

Masa : Januari - Desember
Pajak 2025

Status : Normal
SPT

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal : 04 Februari 2026
Terima SPT

← Balas

→ Teruskan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal
Pajak**

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor : **BPE-**
BPE **23745/CT/KPP.0805/2026**

Tanggal : 10 Februari 2026

NPWP : 3672060906880002

Nama
Wajib : **DEVI ARIYANTO**
Pajak

Jenis SPT : **SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi**

Tahun
Pajak : **2025**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200
informasi@djpp.go.id
pengaduan@djpp.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor : BPE-
BPE **15337/CT/KPP.0801/2026**
Tanggal : 09 Februari 2026

NPWP : 3673011003790008
Nama :
Wajib Pajak : JAPAR SAHRONI
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal

← Balas

→ Teruskan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)

1500200 www.djppajak.go.id

pengaduan@djppajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-15788/CT/KPP.0801/2026**

Tanggal : 10 Februari 2026

NPWP : 7604021109740003

Nama Wajib Pajak : **ACHMAD RACHMAN**

Jenis SPT : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi**

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 10 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP.
SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan profil ini sebagai arsip pribadi Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-15348/CT/KPP.0801/2026**
Tanggal : 09 Februari 2026
NPWP : 3604020506820085
Nama Wajib Pajak : SAPRUDIN
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-23272/CT/KPP.0805/2026
Tanggal : 10 Februari 2026
NPWP : 3602141106990004
Nama Wajib Pajak : LUQMAN NULHAQIM
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 10 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Direktorat DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

1. Nomor Pengumuman Resmi Pengumuman Pajak : 23272/CT/KPP.0805/2026



Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: gagus8635@gmail.com

Sen, 9 Feb 2026 pukul 10.21



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-14868/CT/KPP.0801/2026
Tanggal	: 09 Februari 2026
NPWP	: 3604021510770137
Nama Wajib Pajak	: M.AGUS HASIM
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
Kepada: gagus8635@gmail.com

Sen, 9 Feb 2026 pukul 10.22

[Kutipan teks disembunyikan]



Pajak

Layanan Informasi &

Pengaduan: (021) 1500200

informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : **BPE-**
BPE **31002/CT/KPP.0812/2026**

Tanggal : 27 Februari 2026

NPWP : 3604262109910001

Nama
Wajib : **ASEP SYAHRUDIN**
Pajak

Jenis SPT : **SPT Tahunan PPh Wajib**
Pajak Orang Pribadi

Tahun
Pajak : **2025**

Masa
Pajak : **Januari - Desember 2025**

Status SPT : **Normal**

Saluran : **Portal Wajib Pajak**

Tanggal
Terima : **27 Februari 2026**
SPT



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 ♦ informasi@pajak.go.id ♦
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-13980/CT/KPP.0801/2026**
Tanggal : 06 Februari 2026

NPWP : 3673030602940003
Nama Wajib Pajak : MUHTADI

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 06 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax
DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak
memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP.



Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor : **BPE-**
BPE **24663/CT/KPP.0805/2026**

Tanggal : 11 Februari 2026

NPWP : 3602171103930004

Nama
Wajib : MA'ANI
Pajak

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun
Pajak : 2025

Masa
Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal



kepada saya ▾

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)

1500200 [djpp.go.id](https://www.djpp.go.id)www.djpp.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**Nomor BPE : **BPE-**
22875/CT/KPP.3008/2026

Tanggal : 12 Februari 2026

NPWP : 3174060802970004

Nama Wajib
Pajak : ARIEF FEBRIANTOJenis **SPT** : **SPT** Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status **SPT** : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima **SPT** : 12 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan
Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

← Balas

→ Teruskan





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:
(021) 1500200

informasi.pajak@dj.p.go.id
pengaduan@dj.p.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-
14902/CT/KPP.0801/2026**

Tanggal : 09 Februari 2026

NPWP : 3673011111940005

Nama Wajib Pajak : M. ANWAR HUSAIN

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT : 09 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan
Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

← Balas

→ Teruskan

